

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia otonomi daerah sangat penting bagi daerah otonom untuk mengembangkan potensi daerahnya. Seperti tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004, Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Asas desentralisasi sangat dibutuhkan oleh daerah otonom.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Dengan adanya otonomi daerah, permasalahan di daerah lebih efektif dan efisien apabila urusan-urusan di daerah ditangani oleh pemerintah lokal. Kemandirian suatu daerah sangat diperlukan karena suatu daerah yang mandiri berarti tingkat ketergantungannya kepada pemerintah pusat sangat rendah. Daerah yang mandiri dapat dilihat dari kinerja daerah dalam mengelola keuangannya.

Ketergantungan terhadap pemerintah pusat harus seminimal mungkin sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasarat mendasar dalam system pemerintahan Negara. PAD juga merupakan salah satu tolak ukur dari keberhasilan pelaksanaan otonomi

daerah. Pendapatan Asli Daerah yang besar juga menunjukkan besarnya partisipasi masyarakat dalam menanggung biaya pembangunan dan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah yang besar dapat memberikan kebebasan besar bagi pemerintah daerah untuk membuat inisiatif dan rencana yang dibutuhkan oleh daerah. (A.Kuswandi, 2009).

Menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004, keuangan daerah adalah kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta antara Provinsi dan Kabupaten/Kotamadya yang merupakan prasyarat dalam system pemerintah daerah. Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintah menjadi kewenangan daerah. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 pasal 1 menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah, yang dipungut berdasarkan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolak ukur yang penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab. Otonomi daerah membawa dampak positif bagi daerah yang memiliki sumber daya alam, tetapi tidak demikian dengan daerah yang miskin sumber daya alamnya, yang merupakan salah satu masalah yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten/Kota pada umumnya adalah terbatasnya dana yang berasal dari daerah sendiri (PAD),

sehingga proses otonomi daerah belum bisa berjalan sebagai mana mestinya (Aziz, 1997).

Pendapatan asli daerah faktor penting dalam otonomi daerah yaitu pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atas segala sumber dan potensi yang ada di daerah yang harus diolah oleh pemerintah daerah di dalam memperoleh pendapatan daerah. Untuk menggali berbagai potensi di suatu daerah diharapkan daerah dapat memanfaatkan potensi yang ada untuk meningkatkan pembangunan daerahnya. Prinsip dasar pemberian otonomi dimaksud berdasarkan atas pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Atas pertimbangan ini, maka pemberian otonomi diharapkan pada akhirnya akan lebih memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah secara bersama-sama menjadi komponen PAD. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang utama dan sangat penting bagi pemerintah daerah. Pajak daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terdiri dari Pajak Kabupaten/kota. Pajak daerah dan retribusi daerah dianggap sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbesar sehingga pelaksanaannya harus jelas dan tidak menyimpang dari yang ditetapkan Undang-undang Pemerintah daerah dapat menentukan tarif berdasarkan Undang-undang dan tidak bisa melebihi batas yang sudah

ditetapkan sehingga kemampuan masyarakat untuk membayar pajak serta retribusi tidak berat.

Ketika suatu daerah memiliki pendapatan asli daerah yang besar dan selalu meningkat setiap tahunnya, maka daerah tersebut sudah dapat memaksimalkan kemampuan daerahnya dan mencerminkan keadaan atau kemampuan ekonomi yang baik dan stabil. Namun, ketika suatu daerah mengalami kesulitan dalam memaksimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah maka akan timbul masalah dan gejolak ekonomi yang tidak stabil di daerah tersebut.

Jadi, pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dapat dengan bijak menyaring apa saja yang dapat dimasukkan kedalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan ditentukan dalam Peraturan Daerah dan dibutuhkan sosialisasi dari pemda untuk memberikan informasi dan pemahaman yang seluas-luasnya mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pentingnya bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan kepada masyarakat. Transparansi anggaran harus dilaksanakan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah yang bersangkutan.

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan suatu perencanaan yang tepat dengan

memperhatikan potensi yang dimilikinya terutama dalam mengidentifikasi keterkaitan antara PAD, PDRB, Jumlah Penduduk dan Investasi.

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009-2013

Tahun	PAD	Pertumbuhan(%)
2009	73,533,876.52	-
2010	86,406,243.60	14,89%
2011	103,796,345.68	16,75%
2012	111,114,536.24	6,58%
2013	117,547,402.89	5,47%

Sumber : BPS Kab. Banjarnegara, diolah.

PAD Kabupaten Banjarnegara setiap tahun terus meningkat, terlihat dalam Tabel 1.1. Di tahun 2010 Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar 14,89% , di tahun 2011 meningkat sebesar 16,75%, di tahun 2012 meningkat 6,58%, dan di tahun 2013 meningkat sebesar 5,47%.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran yang nyata dari dampak suatu kebijakan pembangunan yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan tersebut merupakan laju pertumbuhan yang terbentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Bagi daerah indikator ini sangat perlu untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arus pembangunan di masa yang akan datang. Laju pertumbuhan ekonomi daerah dapat ditunjukkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Indikator yang sering kali digunakan dalam melihat sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah adalah

aspek ekonomi dan tenaga kerja sebagai penopang kekuatan dan kelemahannya (Sukirno, 1978).

Pembangunan di suatu daerah dapat dikatakan berhasil apabila pertumbuhan perekonomian meningkat. Pada umumnya perkembangan perekonomian suatu wilayah dapat diketahui melalui perkembangan PDRB dan sumbangan setiap sektor terhadap nilai PDRB tersebut. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara/wilayah/daerah. PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Perkembangan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB.

Perkembangan PDRB di Kabupaten Banjarnegara. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjarnegara yang terlihat dari PDRB, didominasi oleh sektor pertanian sebesar 36,09%, sektor jasa-jasa sebesar 18,50%, sektor perdagangan sebesar 13,63%, sektor industri sebesar 11,51%, sektor bangunan sebesar 7,05%, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 7,25%, sektor angkutan dan komunikasi sebesar 5,03%, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,49% dan sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 0,46%. Selama tahun 2011, banjarnegara mengalami laju pertumbuhan ekonomi mencapai 4,85%, sedangkan inflasi secara kumulatif sebesar 4,73%. (sumber banjarnegara kab.go.id).

Tabel 1.2
PDRB Kabupaten Banjarnegara Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2009-2013

Tahun	PDRB	Peningkatan PDRB (%)
2009	2.89	-
2010	3.12	7,37%
2011	3.15	0,95%
2012	3.21	1,86%
2013	3.27	1,83%

Sumber : BPS Kab. Banjarnegara.

Tabel 1.2 menunjukkan PDRB Kabupaten Banjarnegara meningkat setiap tahunnya, tahun 2010 PDRB meningkat 7,37%, tahun 2011 PDRB meningkat 0,95%, tahun 2012 PDRB meningkat 1,86%, tahun 2013 PDRB meningkat 1,83%.

Tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Hubungan antara PAD dengan PDRB merupakan hubungan secara fungsional, karena PDRB merupakan fungsi dari PAD. Dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan dan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitasnya.

Keberhasilan pembangunan perekonomian dari suatu wilayah dan kinerjanya dapat diamati melalui beberapa indikator makro. Indikator makro tersebut dapat dianalisis melalui PDRB yang dapat didefinisikan sebagai penjumlahan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah/daerah tersebut dalam periode tertentu. Jadi PDRB adalah nilai tambah yang pengukurannya berdasarkan adanya

aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan produk barang dan jasa, yang diukur dengan besaran dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan juga sebagai indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu. Data PDRB juga dapat menggambarkan kemampuan daerah mengelola sumber daya pembangunan yang dimilikinya, oleh karena itu besaran PDRB setiap daerah bervariasi sesuai dengan potensi yang dimiliki dan faktor produksi masing-masing daerah (Sukirno, 1978).

Jumlah penduduk selalu bertambah sehingga kepadatan populasi terus meningkat. Hal ini akan berpengaruh pada daya dukung lingkungan. Daya dukung lingkungan yang terbatas menyebabkan terjadinya kelangkaan sumber daya alam, terjadinya pencemaran, dan timbul persaingan untuk mendapatkan sumber daya alam. Selain itu pertumbuhan penduduk yang tinggi tanpa diikuti pertumbuhan ekonomi yang seimbang sering kali hanya menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas rendah. Masalah kependudukan dan kerusakan lingkungan hidup merupakan dua permasalahan yang kini sedang dihadapi bangsa Indonesia, khususnya maupun negara-negara lainnya di dunia umumnya. Brown (1992:265-280), menyatakan bahwa masalah lingkungan hidup dan kependudukan yaitu masalah pencemaran lingkungan fisik, desertifikasi, deforestasi, over eksploitasi terhadap sumber-sumber alam, serta berbagai fenomena degradasi ekologis semakin hari semakin menunjukkan peningkatan yang signifikan. Keprihatinan ini tidak saja memberikan agenda penanganan masalah lingkungan yang bijak. Namun juga

merupakan “warning” bagi kehidupan, bahwa kondisi lingkungan hidup sedang berada pada tahap memprihatinkan. Seandainya tidak dilakukan upaya penanggulangan secara serius, maka dalam jangka waktu tertentu kehidupan ini akan musnah. Hal ini terjadi menurut Soemarwoto (1991:1), karena lingkungan (alam) tidak mampu lagi memberikan apa-apa kepada kita. Padahal seperti kita ketahui bahwa manusia merupakan bagian integral dari lingkungan hidupnya, ia tidak dapat dipisahkan dari padanya.

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk cukup padat. Tidak bisa di pungkiri bahwa laju pertumbuhan penduduk. Indonesia begitu pesat dan tidak bisa di hindari, meskipun pemerintah telah melakukan upaya dan berbagai solusi serta berbagai semboyan telah di tawarkan kepada masyarakat namun tetap saja laju pertumbuhan penduduk tidak bisa terbantahkan. Meskipun solusi yang di tawarkan tidak sesuai dengan harapan pemerintah, tapi setidaknya bisa mereduksi sebagian masalah yang ada. Penduduk merupakan unsur penting dalam usaha untuk meningkatkan produksi dan mengembangkan kegiatan ekonomi.

Padatnya penduduk suatu daerah akan menyebabkan ruang gerak suatu daerah semakin terciut, dan hal ini disebabkan manusia merupakan bagian integral dari ekosistem, dimana manusia hidup dengan mengeksploitasi lingkungannya. Pertumbuhan penduduk yang cepat meningkatkan permintaan terhadap sumber daya alam. Pada saat yang sama meningkatnya konsumsi yang disebabkan oleh membengkaknya jumlah penduduk yang pada akhirnya

akan berpengaruh pada semakin berkurangnya produktifitas sumber daya alam. Menurut Wijono (1998:5) kondisi sebagaimana digambarkan tersebut dapat diibaratkan seperti lilin, pertumbuhan penduduk yang cepat akan membakar lilin dari kedua ujungnya. Sehingga batang lilin itu akan cepat meleleh dan habis. Konsekwensinya adalah berubahnya salah satu atau beberapa komponen dalam ekosistem, mengakibatkan perubahan pada interaksi komponen-komponen itu, sehingga struktur organisasi dan sifat-sifat fungsional ekosistem akan berubah pula.

Penduduk adalah semua orang yang biasanya tinggal di suatu tempat atau rumah tangga 6 bulan dan lebih atau yang belum 6 bulan namun berniat untuk menetap. (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Jumlah penduduk dari tahun ke tahun selalu bertambah, penambahan penduduk mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kurva perolehan angka penduduk oleh badan pusat statistik di berbagai kota di Indonesia yang selalu menunjukkan peningkatan. Pertambahan jumlah penduduk disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya kelahiran dan kematian seseorang dan juga migrasi penduduk yang tidak terkendali. Dampak yang ditimbulkan dari pertambahan jumlah penduduk akan mempengaruhi keseimbangan lingkungan dan kelestarian alam didaerahnya. Keseimbangan lingkungan akan terganggu karena luas daerah yang tersedia terkadang tidak sesuai dengan banyaknya jumlah penduduk di suatu daerah. Begitu juga dengan kelestarian alam, karena penambahan penduduk yang pesat

mengakibatkan penduduk tidak lagi peduli terhadap kelestarian alam sekitarnya dan hanya memikirkan kepentingan individualism.

Santosa dan Rahayu (2005) mengatakan, penduduk yang tinggi diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. Jumlah penduduk dalam satu indikator penting dalam suatu Negara Para ahli ekonomi klasik yang di pelopori Adam Smith bahkan menganggap bahwa jumlah penduduk merupakan input yang potensial yang dapat digunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan produksi suatu rumah tangga perusahaan. Semakin banyak penduduk maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat digunakan. Oleh karena jumlah penduduk terus bertambah, maka banyak yang harus dicanangkan untuk mengatasi keadaan jumlah penduduk yang semakin bertambah. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya pendapatan dapat mempengaruhi penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik juga meningkat.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi sebenarnya bisa memberikan dampak positif, di antaranya dapat menjadi unsur penting dalam usaha untuk meningkatkan produksi dan mengembangkan kegiatan ekonomi dengan ketersediaan tenaga kerja yang melimpah. Pertumbuhan penduduk yang tinggi, khususnya yang terjadi di Indonesia tidak hanya bisa berdampak positif saja, tetapi juga akan menimbulkan dampak negatif di berbagai bidang yang

tentunya akan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Dampak negatif dari pertumbuhan penduduk yang tinggi ini akan timbul apabila pertumbuhan penduduk yang terjadi tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung keberlangsungan hidup penduduk yang bersangkutan dalam rangka memperoleh kehidupan dan penghidupan yang makmur dan sejahtera.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi tetapi tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang luas maka hal ini akan menimbulkan pengangguran di mana-mana dan kemiskinan pun tercipta. Ini tentu saja akan mempengaruhi proses kehidupan di bidang lainnya. Kebutuhan ekonomi yang tidak memadai juga dapat berpengaruh pada tingkat pendidikan dan kesehatan seseorang. Bagaimana mau memperoleh pendidikan dan kesehatan yang layak, jika untuk kebutuhan hidup sehari-haripun mereka susah mendapatkannya. Tak hanya berhenti di situ saja, tingkat kriminalitas pun akan meningkat. Orang dalam kondisi lapar akan berbuat apa saja yang penting kebutuhannya bisa terpenuhi. Ujung dari pertumbuhan penduduk yang tinggi itu adalah menimbulkan kerusakan lingkungan dengan segala dampak yang menyertainya seperti menurunnya kualitas pemukiman dan lahan yang ditelantarkan. Intinya, pertumbuhan penduduk yang tinggi berpotensi menimbulkan kemiskinan dan menurunnya kesejahteraan rakyat, sampai menurunnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat menghambat perkembangan negara Indonesia.

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Banjarnegara dapat dipengaruhi oleh kondisi tingkat kelahiran, kematian migrasi dari penduduknya.

Pertumbuhan penduduk yang dipengaruhi oleh tingkat kelahiran dan kematian saja disebut pertumbuhan alami dan pertumbuhan penduduk yang dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, kematian dan migrasi disebut pertumbuhan non alami.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2009-2013

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan (%)
2009	0.93	-
2010	0.93	0%
2011	0.98	5,10%
2012	0.90	-8,88%
2013	0.89	-1,12%

Sumber : BPS Kab. Banjarnegara.

Dari Tabel 1.3 menunjukkan bahwa Jumlah penduduk pada tahun 2010 tidak mengalami peningkatan, tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 5,10%. Tahun 2012 mengalami penurunan sebesar -8,88%, dan tahun 2013 menurun sebesar -1,12%.

Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicerminkan dari tingkat investasi suatu daerah. Suatu penambahan pada pendapatan akan mendorong investasi yang lebih besar. Secara teoritis, daerah dengan peringkat daya tarik investasi yang tinggi akan memilih jumlah PAD yang tinggi pula, karena investasi di suatu daerah dengan sendirinya akan merangsang pertumbuhan ekonomi daerah tersebut untuk kemudian meningkatkan jumlah pendapatan daerah dari pajak.

Perkembangan Investasi di Kabupaten Banjarnegara. Nilai investasi di Kabupaten Banjarnegara mengalami peningkatan yang cukup bagus. Indikator investasi member gambaran positif peningkatan jumlah nilai dan jumlah

investor dari tahun ketahun. Pada tahun 2013 pertumbuhan nilai investasi tumbuh ke level lebih tinggi di atas 100% lebih di bandingkan pencapaian tahun 2012. Pertumbuhan nilai investasi ini diikuti pula dengan bertambahnya jumlah investor dimana dampak baiknya terjadi peningkatan daya serap tenaga kerja” .

Tabel 1.4
Investasi Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2009-2013

Tahun	Investasi	Pertumbuhan (%)
2009	175,115.12	-
2010	198,462.04	11,76%
2011	173,022.23	-14,70%
2012	485,486.53	64,36%
2013	674,020.19	27,97%

Sumber : KP2T Kabupaten Banjarnegara.

Tabel 1.4 menunjukkan Investasi Kabupaten Banjarnegara tahun 2010 mengalami peningkatan 11,76%, tahun 2011 mengalami penurunan - 14,70%, tahun 2012 mengalami peningkatan 64,36%, dan tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 27,97%.

Investasi di Banjarnegara mengalami pertumbuhan yang membaik dari tahun ke tahun. Peningkatan ini tidak lepas dari iklim berinvestasi yang makin kondusif dari tahun ke tahun. Kondisi ini mendorong masuknya pengusaha yang mempunyai modal menengah keatas menanamkan investasinya di Banjarnegara, termasuk naiknya besaran nilai investasi yang ditanamkan. Meski mengalami pertumbuhan yang kian membaik dari tahun ketahun, pihaknya tidak cukup hanya menunggu investor datang. Upaya kreatif jemput

bola juga tengah diupayakan oleh pihaknya untuk menarik sebanyak mungkin investor masuk ke Banjarnegara.

Kabupaten Banjarnegara melakukan upaya untuk mempersiapkan kelayakan infrastruktur pendukung investasi, Kesiapan infrastruktur diantaranya adalah menjamin ketersediaan lokasi untuk investasi, tersedianya akses jalan menuju lokasi, dan tersedianya jaringan listrik. Termasuk di dalamnya adalah perlindungan atau adanya nilai jual tanah yang wajar.

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah dapat meningkatkan pendapatan daerahnya sehingga pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga meningkat. Melalui otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Banjarnegara sangat berperan penting dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dalam hal menggali potensi daerahnya. Sehingga pendapatan daerah yang meningkat dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Sesuai dengan latar belakang masalah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banjarnegara, Tahun 2007-2014”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PDRB Kabupaten Banjarnegara terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banjarnegara.

2. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk Kabupaten Banjarnegara terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banjarnegara.
3. Bagaimana pengaruh Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Kabupaten Banjarnegara terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banjarnegara.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDRB Kabupaten Banjarnegara terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banjarnegara.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk Kabupaten Banjarnegara terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banjarnegara.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Kabupaten Banjarnegara terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banjarnegara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan pemahaman serta dalam rangka memenuhi salah satu

syarat guna meraih gelar kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Bagi akademisi, sebagai sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan informasi serta dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.
3. Bagi pemerintah, sebagai bahan pemikiran untuk menetapkan kebijakan-kebijakan pembangunan daerah dalam rangka upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah.